

Lembaga praperadilan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas polri sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 = Pretrial institution and its effect on police duties as an investigator in the criminal justice system following the ruling of the constitutional court number 21/PUU/XII/2014 / Akta Wijaya Pramasakti

Akta Wijaya Pramasakti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20445951&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Upaya paksa yang dilakukan dalam rangka Penyidikan maupun Penuntutan Tindak Pidana oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini Polri atau Penuntut Umum dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Tujuan lembaga ini dibentuk agar hak-hak tersangka dapat dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tindakan yang dimaksud terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Walaupun lembaga praperadilan tersebut telah diatur dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP, namun seiring perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan bermasyarakat serta perkembangan hukum masyarakat, KUHAP dirasa belum mengakomodir perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015, bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana lembaga praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 16 Maret 2015 dan pengaruhnya terhadap fungsi, tugas dan wewenang Polri sebagai penyidik dalam terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah data secara sistematis, bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan kebijakan formulasi lembaga praperadilan dan penerapannya secara analisis kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yang secara menyeluruh diharapkan dapat menggambarkan peranan dan fungsi lembaga praperadilan saat ini dan menjadikan lembaga praperadilan pada posisi yang sebenarnya sesuai dengan cita-cita pembentukan KUHAP.

ABSTRACT

Forceful measures undertaken in the framework of the Investigation and Prosecution of Crime by competent authorities in this case the police or public prosecutor can be controlled through Pretrial Institution. The purpose of this institution was established so that the rights of suspects can be protected in accordance with the laws and regulations that exist, the action is mainly in terms of arrests and illegal detention as well as the termination of the investigation and prosecution. Although the pretrial institutions have been arranged in the positive law of the Law No. 8 of 1981 on Criminal Proceedings Criminal Procedure Code, but over the time and the development of social life and the development of community law, the Criminal Procedure Code is felt not provide legal protection of the public. This is in accordance with the Constitutional Court

Decision Number 21 PUU XII 2014 dated March 16, 2015, that Article 77 letters a in the Criminal Procedure Code is on the contrary to the 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia to the extent not interpreted as including the designation of suspects, search and seizure. The problems that are the focus of this research is how the pretrial institution after the decision of the Constitutional Court Number 21 PUU XII 2014 dated March 16, 2015 and its influence on the functions, duties and authority of the Police as investigators in the criminal act. This study uses normative juridical approach by examining secondary data which focuses on the study of literature, by collecting, reviewing and processing data systematically, materials library or study documents relating to policy formulation institutions pretrial and implementation qualitative analysis, then made overall conclusions are expected to describe the role and functions of the current pretrial agencies and make pretrial agencies on the actual position in accordance with the ideals of the establishment of the Criminal Procedure Code